

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Adi Maulana, *Blokir Pornografi*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012.

Arief, B. N. (2006). *Tindak pidana mayantara: perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*.

Budi, S. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Chazawi, A. (2016). *Tindak Pidana Pornografi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Wicaksana, Semarang, 1994.

Djubaedah, N. (2006). *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*.

E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, PT. Penerbit Universitas, Jakarta, 1958;

Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016.

HeniSusanti, *Tindak Pidana Khusus (Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Perkembangannya)*, Medan: Suluh Media, 2018.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 57.

- Indonesia, K. B. B. (2008). Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Ishaq, H. (2022). Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi. Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, cet-IV 2008.
- Maskun, S. H. (2013). Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) Suatu Pengantar. Jakarta, Kencana.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
- Puang, Victorianus MH Randa. Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Raharjo, A. (2002). *Cybercrime*: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi. Citra Aditya Bakti.
- Saleh, R. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: PT Aksara Baru.
- Soebagijo, A. (2008). Pornografi: Dilarang tapi dicari. Gema Insani.
- Soedjono Dirjosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia, Mandar Madju, Bandung, 1994.
- Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku I), Alumni, Bandung, 1986,

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung:
Alfabeta

Suhariyanto, Budi. 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*cyber crime*), Jakarta:
Raja Grafindo Persada

Sukandarrumidi. 2012. Metodologi Penelitian. Cetakan Keempat. Gajah Mada
University Press. Yogyakarta.

Susanto, Kriminologi, Ctk I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 44 Tahun tentang Pornografi

C. Data Internet

Andi Muhammad Haswar, “Viral Video Mesum Sesama Jenis di Banjarmasin, Korban Mengaku Mabuk Kemudian Disetubuhi dan Direkam” terdapat dalam <https://regional.kompas.com/> (Regional.kompas, diakses tanggal 3 November 2022)

Badan Intelijen Negara. “Waspada maraknya Video Porno Anak”. Artikel diakses pada 25 Oktober 2021 dari <http://www.bin.go.id/arsip/listing/2014/03/12/>.

Baiquni, A. (2005). *Ensiklopedi Al-Qur'an dunia Islam Modern* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Vasa.

http://sipp.pn-banjarmasin.go.id/list_perkara/, 11-12-2022.

<https://kbbi.web.id/pornografi>, 12 Desember 2021 pukul: 17:04 WITA

Muhammad Helmi, “Heboh video mesum sesama jenis, pelakunya oknum mahasiswa di Banjarmasin” terdapat dalam <https://radarbanjarmasin.jawapos.com> (Radar Banjarmasin.jawapos, diakses tanggal 3 November 2022)

Shanti Rachmadsyah, “*Cyber Pornografi (Pornografi Dunia Maya)*”, artikel diakses pada 26 Oktober 2021 dari [http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b86b6c16c7e4/cyber-pornography-\(pornografi-dunia-maya\)-](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b86b6c16c7e4/cyber-pornography-(pornografi-dunia-maya)-)

Siti Nurjannah Wulandari, “Fakta Kasus VIRAL Video Mesum Banjarmasin, Pemeran Ternyata Selebgram hingga Tanggapan Pihak Kampus” terdapat dalam <https://www.tribunnews.com> (tribunnews, diakses tanggal 3 November 2022)

Sulaeman, W. A. *REVENGE PORN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1288/Pid. Sus/2017/PN BJM)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Teguh Arifiyadi., “Prosedur Penanganan Kasus Penyebaran Video Bermuatan Asusila)”, artikel diakses pada 29 Oktober 2021 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5954/cyber-crime/>

D. Jurnal

- Anjarwi, D. W. (2015). Langkah Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Perdagangan Online (Doctoral dissertation, UAJY).
- Atem, A. (2016). Ancaman *Cyber Pornography* Terhadap Anak-Anak. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(2), 107-121.
- Cayo, P. N. S. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Pidana *Cyberporn* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite). *Justici*, 12(2), 19-30.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Eldar, S., & Laist, E. (2017). The irrelevance of motive and the rule of law. *New Criminal Law Review*, 20(3), 433-464.
- Fadlian, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Ancaman *Cyberporn* Bagi Pengguna Aplikasi Twitter: . *De Juncto Delicti: Journal Of Law*, 1(2), 106-131.
- Febriansyah, F. I. (2017). Tindak Pidana *Cyberporn* Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi. *Perspektif*, 22(3), 213-221.

- Fikry, M. (2017). Tinjauan tentang *Cyber Pornografi* dari perspektif hukum pidana indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Firdaus, S., Din, M., & Jauhari, I. (2019). Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 241-254.
- Guntara, D. (2018). Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Teori *Differential Association*. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Hamzah, A. (1987). *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*. Bina Mulia.
- J. Mitchell Miller And Holly Ventura Miller, “*Sociological Criminology And Drug Use: A Review Of Leading Theories*,” In *The Nurture Versus Biosocial Debate In Criminology: On The Origins Of Criminal Behavior And Criminality*, 2014
- Meier, R. F. (1976). The new kriminologi: Continuity in criminological theory. *J. Crim. L. & Kriminologi*, 67, 461.
- Putra, D. A. S., & Rizqia, G. P. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporn di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2018). Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia). *Mimbar Yustitia*, 2(2), 142-158.
- Razak, T. M. T. A., Alim, N. N. A. A., Kamaruddin, N. K., Lateh, N., & Hashim, N. (2021). *Pornografi Dalam Kalangan Remaja Generasi Z Menurut*

Perspektif Islam: Pornography Among Z Generation Adolescents From The Islamic Perspective. *Online Journal of Research in Islamic Studies*, 8(2), 67-78.

Renardi, A., Marlina, M., & Afan, I. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi Mengupload Video Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 2661/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 442-457.

Sari, U. I. P. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia. *Jurnal Studia Legalia*, 2(01), 58-77.

Siroj, H. M., & Marzuki, I. (2017). Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 1(2).

Sunardi, S. (2022). Kebijakan Sanksi Pidana Bagi Penyedia Jasa Dan Penyebarluas Pornografi Dalam Undang–Undang Ite Serta Menurut Hukum Islam. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(2), 114-124.
[Http://Journal.Upgris.Ac.Id/Index.Php/Meta-Yuridis/](http://Journal.Upgris.Ac.Id/Index.Php/Meta-Yuridis/)

Taufiq, Z. F. (2020). Covid 19 Dan Angka Kriminalitas: Penerapan Teori-Teori Kriminologi. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4). Dapat Diakses Dari [Http://Ejournal.Mandalanursa.Org/Index.Php/Jisip/Index](http://Ejournal.Mandalanursa.Org/Index.Php/Jisip/Index)

Tjhoeng, M. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-iringan Di Kota Balikpapan. *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).

Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.

E. Wawancara

Wawancara dengan AKP Kamaruddin, Panit Subdit 5 Tindak pidana Siber.

Ditreskrimsus Polda Kalsel, Di Banjarmasin, 27 Febuari 2023.

Wawancara dengan Briпка Glery Ferdinand Hutapea, Banit Unit 2 Subdit 5

Ditreskrimsus Polda Kalsel, Di Banjarmasin, 27 Febuari 2023.

Wawancara dengan Briпка Tommy Hendra Saputra, SH Bamindik Bag Binopsnal

Dit Reskrimsus Polda Kalsel, Di Banjarmasin, 26 April 2023

Wawancara dengan narapidana pornografi laki-laki inisial KR di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin, Senin 6 Maret 2023.

Wawancara dengan narapidana pornografi laki-laki inisial ON di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin, Senin 6 Maret 2023.